

Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Randy Givari Yurnal^{1*}, Dian Fitria Handayani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: randygvr04@gmail.com

Tanggal Masuk:

20 Maret 2024

Tanggal Revisi:

01 November 2024

Tanggal Diterima:

03 November 2024

Keywords: *Capital Expenditure; Fiscal Pressure; General Allocation Fund (DAU); Special Allocation Fund (DAK).*

How to cite (APA 6th style)

Yurnal, R. G., & Handayani, D. F. (2024). Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (4), 1737-1750.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.1594>

Abstract

*The purpose of this study is to ascertain the impact of capital spending, the Special Allocation Fund (DAK), and the General Allocation Fund (DAU) on the budgetary pressures placed on the provincial regional administration of West Sumatra. Purposive sampling was the method of sampling that was applied. For the 2019–2021 timeframe, 19 districts/cities in the West Sumatra Province were included in the research sample. Secondary data from the Ministry of Finance's DJPK website and the Central Statistics Agency (BPS) were utilized. Multiple regression analysis, which includes the *t*, *f*, and coefficient of determination tests, is the analytical technique employed. The regression test's findings indicate that capital spending has no significant impact on fiscal stress, but DAK and DAU have substantial negative and positive effects, respectively. the concurrent impact of capital spending, DAU, and DAK on major fiscal strain in the West Sumatra Province regional government in 2019–2021.*



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Prasad et al., 2019). Otonomi daerah telah diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 dimana undang-undang yang telah disempurnakan dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No.22 Tahun 1999 yang berisikan penjelasan mengenai pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Halim dan Abdullah, 2007).

Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran yang terjadi karena terbatas pendapatan daerah yang sangat besar mempengaruhi pendapatan. Dengan tingkat yang tinggi tekanan fiskal, daerah menjadi lebih termotivasi untuk menggali dan mengoptimalkan pendapatan daerah mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat pemerintah. Menurut Sobel dan Holcombe dan Setyawan, (2010), krisis keuangan disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran.

Fiscal stress ini ditandai fenomena dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Retribusi Daerah yang sebelumnya mengatur pendapatan daerah yang dipungut kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat, menjadi daerah diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemda dalam bentuk melayani publik. Kemunculan undang-undang ini disebabkan oleh kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterbatasan basis pajak daerah, masalah dalam pemungutan Peraturan Daerah, dan kelemahan dalam pengawasan pendapatan daerah karena mekanisme pengawasan yang masih bersifat otoriter dan minimnya penerapan sanksi yang efisien.

Kemudian kuatnya peran pemerintah pusat dalam mengelola APBD juga menjadi tantangan terbesar dalam desentralisasi fiskal. Hal ini diketahui dari banyaknya daerah yang menjadikan sebagian besar APBD bergantung dari aliran dana transfer pemerintah yang sebenarnya ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah. Mengingat Sebagian besar dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dipakai khususnya untuk belanja pegawai. Di sebagian wilayah, alokasi untuk belanja pegawai bahkan mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari desentralisasi fiskal ini belum optimal. Dana Alokasi Umum (DAU) APBN menyuplai dana agar dapat memfasilitasi proses desentralisasi dan pemerataan kapasitas keuangan daerah (Savitri, 2021).

Faktor yang kedua Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang dianggap sebagai prioritas nasional. DAK diharapkan dapat membantu daerah dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik dan melaksanakan proyek pembangunan. Namun, pengelolaan DAK sering kali tidak lepas dari berbagai masalah yang dapat menyebabkan tekanan fiskal atau fiskal stress bagi pemerintah daerah (Purbadharmaja et al., 2019; Sulaiman et al., 2021).

Dalam upaya meningkatkan fasilitas penunjang dan layanan, belanja modal memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan di daerah, termasuk Sumatera Barat. Sharma (2012) menyatakan bahwa dalam konteks pembangunan daerah, dimensi, kemampuan belanja, dan efisiensi penggunaan dana modal pemerintah memiliki dampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pentingnya belanja modal dalam konteks pembangunan, pemerintah diwajibkan untuk menetapkan regulasi terkait belanja modal minimum yang perlu dialokasikan dalam APBD. Dengan adanya peraturan mengenai alokasi minimal belanja dari berbagai aspek APBD, pemerintah daerah diharapkan dapat optimal dalam memanfaatkan potensi lokalnya, yang pada gilirannya dapat berdampak positif dalam mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat (Sharma, 2012).

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang dipaparkan, dibutuhkan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi *Fiscal Stress* (tekanan anggaran) dengan tujuan mencapai efektivitas yang mampu meningkatkan kualitas anggaran pemerintah daerah, berdampak positif bagi kesejahteraan publik. Dari sudut pandang lain, penelitian mengenai *Fiscal Stress* secara umum sebelumnya belum mencapai hasil yang konsisten dan masih terbatas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat

REVIU LITERATUR

Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) mengidentifikasi di mana prinsipal mempekerjakan orang lain untuk melakukan layanan tertentu demi keuntungan mereka dan mendelegasikan kuasa dalam pemilihan keputusan kepada agen. Asas dasar teori ini menggambarkan bahwa

terdapat dua kelompok yang terlibat dalam suatu kesepakatan atau kontrak, yakni prinsipal yang memberikan kuasa, dan penerima wewenang tersebut yang disebut dengan agen. Fokus utama penelitian ini berkisar pada teori keagenan, yang dapat mendefinisikan hubungan antara prinsipal dan agen dalam progress penganggaran serta perubahan anggaran. Dalam konteks penganggaran, prosesnya dipengaruhi oleh kepentingan eksekutif dan legislatif. Perilaku ini terkait dengan tingginya kepentingan pribadi lembaga legislatif yang menguntungkan politisi (Keefer & Khemani, 2003). Hubungan eksekutif-legislatif tidak terbatas pada penganggaran tetapi meluas ke konteks lain, misalnya proses pemilu (Parawitha Lucca, 2022).

Fiscal Stress

Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran yang terjadi karena terbatas pendapatan daerah yang sangat besar mempengaruhi pendapatan. Dengan tingkat yang tinggi tekanan fiskal, daerah menjadi lebih termotivasi untuk menggali dan mengoptimalkan pendapatan daerah mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat pemerintah. Menurut Sobel dan Holcombe dan Setyawan, (2010), krisis keuangan disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) APBN menyuplai dana agar dapat memfasilitasi proses desentralisasi dan pemerataan kapasitas keuangan daerah (Savitri, 2021). Dana Alokasi Umum (DAU) memainkan peran penting dalam menentukan tekanan fiskal. DAU merupakan salah satu jenis alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional keuangannya.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang disalurkan kepada daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu mendanai kebutuhan khusus. Tidak dapat diperkirakan setiap tahunnya jumlah DAK yang diberikan karena prosedur alokasi DAK mempertimbangkan ketersediaan dana APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) tersedia untuk daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan atau masalah khusus

Belanja Modal

Belanja modal mengacu pada pendanaan yang ditujukan guna mendapatkan barang-barang atau membangun aset tetap yang berdampak positif dalam periode lebih dari satu tahun. Selain itu, belanja modal juga mencakup penggunaan jasa yang terkait dengan realisasi program pemerintah daerah Erlina dan Rasdianto (2013:31).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Ichi, et al., (2021) Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi PDRB, Dana Alokasi Umum, Desentralisasi Fiskal, dan Diversifikasi Pendapatan Daerah terhadap *Fiscal Stress*. Hasilnya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, artinya semakin besar DAU yang diterima daerah, semakin rendah tekanan fiskal yang dialami. Sebaliknya, belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap *fiscal stress*, di mana peningkatan belanja modal tanpa diimbangi dengan PAD yang memadai dapat menyebabkan tekanan fiskal yang lebih tinggi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Marya Ulfa Q, et al. (2021) mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tekanan fiskal di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, PAD dan DAU tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tekanan fiskal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

Hal yang sama dilakukan Widyahastuti (2021) dengan judul Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap tekanan fiskal, sementara desentralisasi fiskal berpengaruh positif secara parsial. Pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*, sedangkan belanja modal memiliki pengaruh negative terhadap *fiscal stress*.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap *fiscal stress*

Dana Alokasi Umum diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak dan pendapatan negara lainnya. Dana ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya. Besarannya ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk populasi, kemiskinan, dan kinerja fiskal daerah. Dana Alokasi Umum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan antara daerah-daerah di Indonesia. m beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengalami Fiscal Stress yang signifikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi Fiscal Stress ini adalah penggunaan DAU yang tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam penggunaan DAU untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi Fiscal Stress.

Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Juniarti (2023) di Jambi menemukan bahwa peningkatan DAU berpengaruh terhadap fiscal stress. Dapat diartikan bahwa jika DAU meningkat maka fiscal stress juga akan mengalami peningkatan. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap fiscal stress pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

Menurut Darise (2008:137), Tujuan Dana Alokasi Khusus guna mendanai proyek-proyek tertentu pada daerah yang menjadi tanggung jawab daerah dan mengutamakan prioritas nasional. Ini meliputi pembiayaan sarana dan prasarana layanan dasar publik yang belum memenuhi kriteria yang ditentukan ataupun memacu pertumbuhan pembangunan daerah. DAK berasal dari pendapatan APBN dan disalurkan kepada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal.

Menurut teori keagenan, DAK adalah sejumlah uang yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah atau kabupaten, di antara badan-badan pemerintah di tingkat yang lebih rendah, untuk tujuan tertentu. Dalam teori keagenan, prinsipal (pemberi wewenang) dan agen (pelaksana wewenang) memiliki hubungan dimana prinsipal ingin memastikan bahwa agen bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Rumusan hipotesis penelitian berikut ini dapat dibuat berdasarkan justifikasi yang diberikan di atas:

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Pengaruh *Fiscal stress* terhadap Perubahan anggaran belanja modal

Belanja modal adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas publik, dan program-program pemerintahan. Namun, penggunaan belanja modal yang tidak efektif dapat meningkatkan tekanan fiskal dan mengakibatkan fiscal stress. Berikut adalah beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh belanja modal terhadap fiscal stress:

Penelitian oleh Bernadeta Eva Mariani (2016) Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress di kabupaten/kota Sumatera. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran belanja modal yang tidak merata di beberapa daerah, seperti kabupaten Ketapang yang memiliki belanja modal tertinggi di Kalimantan Barat. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat asosiatif kausal yang memakai pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian asosiatif kausal agar dapat mengidentifikasi keterkaitan sebab-akibat antara dua variabel maupun lebih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2008). Pendekatan kuantitatif diaplikasikan pada penelitian ini dengan penggunaan data numerik atau angka yang dianalisis menggunakan metode statistik. Variabel yang terlibat ada penelitian ini adalah DAU, DAK, Belanja Modal sebagai variabel independen, sementara fiscal stress menjadi variabel dependen. Wilayah penelitian berfokus kepada kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat, dan analisis statistik dipergunakan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen.

Populasi pada penelitian merujuk kepada keseluruhan subjek atau objek yang menjadi fokus pengamatan atau kajian. Arikunto (2002) mengartikan populasi sebagai keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian, di mana semua bentuk yang relevan di lapangan akan dialami dan didokumentasikan. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari semua Kabupaten/Kota yang mempunyai data lengkap terkait DAU, DAK, dan Fiscal stress dari tahun 2019 sampai 2021, yang tersedia dalam database BPS Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan sampel penelitian dengan memakai metode purposive sampling, sebagai kriteria utama adalah ketersediaan data yang lengkap mengenai DAU, DAK, dan Fiscal stress dari tahun 2019 sampai 2021

Teknik Analisis Data

Dalam analisis statistik deskriptif, beberapa statistik yang digunakan termasuk rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Statistik ini mencerminkan nilai-nilai pusat, nilai terendah, dan nilai tertinggi dari distribusi data. Tujuan utama dari analisis statistik deskriptif adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang data yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap setiap indikator pengukuran variabel.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti perlu memverifikasi beberapa asumsi untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam model regresi mencerminkan data dan tren yang sebenarnya dengan akurat. Analisis regresi ini didasarkan pada tiga asumsi utama, yakni adanya multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas. Beberapa uji statistik, termasuk uji regresi parsial (t-test), uji regresi simultan (F-test), dan uji koefisien determinasi (Adjusted R-Squared), digunakan untuk mengevaluasi hipotesis::

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis statistik deskriptif adalah metodologi yang digunakan untuk mengkarakterisasi dan memahami karakteristik dari sebuah dataset tanpa membuat generalisasi yang luas (Ghozali, 2016). Pendekatan ini menggunakan ukuran-ukuran seperti

standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, rata-rata, median, dan parameter statistik lainnya untuk menilai distribusi data. Analisis statistik deskriptif biasanya digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang berasal dari tanggapan responden di berbagai indikator pengukuran..

Fiscal Stress

Analisis deskriptif dari variabel *Fiscal Stress* untuk periode 2019 hingga 2021 di Kabupaten/Kota, *Fiscal Stress* mengacu pada tingkat tekanan fiskal yang dihadapi oleh suatu wilayah, yang mencerminkan kondisi keuangan daerah tersebut. Pada tahun 2019, Kabupaten Tanah Datar memiliki tingkat *Fiscal Stress* tertinggi dengan nilai 19,07, sedangkan Kota Padang memiliki tingkat *Fiscal Stress* terendah dengan nilai 14,14. Namun, pada tahun 2020, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tingkat *Fiscal Stress* tertinggi dengan nilai 19,46, sementara Kota Padang memiliki tingkat *Fiscal Stress* terendah dengan nilai 14,66. Pada tahun 2021, Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat *Fiscal Stress* tertinggi dengan nilai 18,97, sementara Kota Pariaman memiliki tingkat *Fiscal Stress* terendah dengan nilai 11,20.

Secara keseluruhan, rata-rata *Fiscal Stress* untuk Kabupaten/Kota selama periode 2019-2021 adalah sekitar 16,99, dengan standar deviasi sekitar 0,97. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami variasi yang relatif kecil dalam tingkat tekanan fiskal mereka selama periode tersebut. Analisis ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama periode tersebut. Kabupaten/Kota dapat menggunakan informasi ini untuk memahami tingkat tekanan fiskal mereka dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mereka secara efektif.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan yang vital bagi Kabupaten/Kota di Indonesia, dan analisis data DAU dari tahun 2019 hingga 2021 menyoroti pola alokasi dan tren perubahan di berbagai wilayah. Data tersebut menggambarkan alokasi DAU per kapita dalam rupiah (dinyatakan dalam persen), mencakup rata-rata, nilai maksimum dan minimum, serta deviasi standar. Dari data yang disajikan, Kabupaten/Kota menunjukkan variasi dalam alokasi DAU per kapita mereka. Kabupaten Pesisir Selatan menonjol dengan alokasi DAU tertinggi pada tahun 2020, mencapai 20,59 persen, sementara Kota Bukittinggi memiliki alokasi DAU terendah pada tahun yang sama dengan 19,97 persen. Selain itu, Kabupaten Padang memiliki alokasi DAU tertinggi pada tahun 2019, 20,88 persen, sementara Kota Sawahlunto memiliki alokasi DAU terendah pada tahun yang sama dengan 19,77 persen.

Tren umum menunjukkan variasi kecil dalam alokasi DAU dari tahun ke tahun di sebagian besar Kabupaten/Kota. Sebagian besar wilayah mengalami fluktuasi kecil dalam alokasi DAU mereka, tetapi ada beberapa pengecualian di mana fluktuasi lebih signifikan. Misalnya, Kabupaten Agam mengalami peningkatan alokasi DAU dari tahun 2019 hingga 2020 (dari 20,54 menjadi 20,55persen), sementara Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan alokasi dalam periode yang sama (dari 20,39 menjadi 20,40 persen).

Dana Alokasi Khusus

Data Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2019 hingga 2021 untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menunjukkan variasi alokasi dana dalam persentase tertentu. Kabupaten Padang Pariaman menonjol dengan alokasi DAK tertinggi pada tahun 2020, mencapai 26,51 persen, sementara Kota Padang memiliki alokasi DAK tertinggi pada tahun 2021 dengan 26,55 persen. Di sisi lain, Kota Padang Panjang memiliki alokasi DAK terendah pada tahun 2019, hanya 24,63 persen. Secara umum, rata-rata alokasi DAK dari

tahun 2019 hingga 2021 adalah sebesar 25,80 persen, dengan deviasi standar sekitar 0,56. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi dalam alokasi dana mereka selama periode tiga tahun tersebut, meskipun fluktuasi tersebut relatif kecil.

Tren umum menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami peningkatan alokasi DAK dari tahun 2019 hingga 2021, meskipun ada beberapa pengecualian di mana fluktuasi lebih signifikan. Misalnya, Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan alokasi DAK dari tahun 2020 ke 2021, sementara Kabupaten Solok mengalami peningkatan signifikan dalam periode yang sama. Analisis data ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. Kabupaten/Kota dapat menggunakan informasi ini untuk memahami tren alokasi DAK mereka dan membuat keputusan yang lebih baik dalam memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek prioritas lainnya.

Belanja Modal

Analisis deskriptif dari variabel Belanja Modal untuk periode tahun 2019 hingga 2021 di Kabupaten/Kota. Belanja modal mengacu pada pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau investasi dalam aset modal, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Pada tahun 2019, Kota Padang mencatatkan jumlah belanja modal tertinggi sebesar 491 juta rupiah, sementara Kabupaten Solok memiliki belanja modal terendah dengan hanya 115 juta rupiah. Tahun 2020 menunjukkan variasi dalam belanja modal, dengan Kota Padang masih menunjukkan jumlah tertinggi sebesar 304,8 juta rupiah, dan Kabupaten Solok kembali memiliki belanja modal terendah dengan 32,74 juta rupiah. Tahun 2021, Kota Padang kembali memiliki belanja modal tertinggi dengan 297,91 juta rupiah, dan Kota Solok tetap menjadi yang terendah dengan 99,27 juta rupiah.

Secara keseluruhan, rata-rata belanja modal untuk semua Kabupaten/Kota selama periode tersebut adalah sekitar 167,28 juta rupiah, dengan standar deviasi sekitar 66,98 juta rupiah. Hal ini menunjukkan variasi yang cukup besar dalam belanja modal antara Kabupaten/Kota. Analisis ini memberikan gambaran tentang alokasi belanja modal di Kabupaten/Kota Sumatera Barat selama periode 2019-2021. Informasi ini penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas publik untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap Fiscal Stress Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi ini membantu dalam menentukan kesesuaian penggunaan model regresi berganda dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 1. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24,068	3	8,023	3,018	.038 ^b
	Residual	140,868	53	2,658		
	Total	164,937	56			
a. Dependent Variable: <i>Fiscal Stress</i>						
b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus						

Berdasarkan hasil Uji F, yang menilai regresi simultan, nilai signifikansi sebesar 0,038, menunjukkan bahwa kurang dari 0,05. Ini memperlihatkan adanya pengaruh secara bersama-sama antara Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Fiscal Stress.

Uji t

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-	61.587		-2.483	.016
		152.922				
	Dana Alokasi Umum	8.812	3.199	1.580	2.754	.008
	Dana Alokasi Khusus	-.016	.006	-1.781	-2.739	.008
	Belanja Modal	.009	.005	.420	1.932	.059

a. Dependent Variable: *Fiscal Stress*

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 25 (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data uji hipotesis diatas dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap fiscal stress, sehingga mendukung diterimanya hipotesis pertama. Dengan nilai signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$, variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap fiscal stress, sehingga mendukung diterimanya hipotesis kedua. Berlawanan dengan ekspektasi, nilai signifikansi sebesar $0.058 < 0.05$ untuk variabel Belanja Modal mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fiscal stress, sehingga menolak hipotesis ketiga..

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.382 ^a	.146	.098	1.63031

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: *Fiscal Stress*

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 25 (2024)

Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,146, yang menunjukkan bahwa 14,6% variasi variabel dependen (Fiscal Stress) dapat dijelaskan oleh variabel independen (Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Selain itu, nilai R-squared sebesar 0,098 menunjukkan bahwa variabel lain memberikan kontribusi sebesar 9,8% terhadap variabel dependen (Fiscal Stress), sedangkan Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki peran yang signifikan. Namun demikian, variabel-variabel independen yang

dimasukkan dalam model gagal menjelaskan 90,2% dari varians tekanan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, mungkin variabel yang tidak terukur atau faktor lingkungan eksternal, kemungkinan besar mempengaruhi tekanan fiskal. Akibatnya, terlepas dari kontribusi yang signifikan dari variabel-variabel independen, model ini tidak mampu menangkap semua aspek variasi.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap *Fiscal Stress* Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nilai sig menunjukkan bahwa berdasarkan uji hipotesis, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Didukung dengan t-hitung > t-tabel atau $2,754 > 2,005$ dan nilai sig sebesar $0,008 < 0,05$. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Stres Fiskal pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat saling dipengaruhi secara signifikan.

Penemuan ini sejalan dengan temuan investigasi yang dilakukan oleh ICHSAN (2018), yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh yang baik terhadap *fiscal stress*. Pengeluaran di daerah dianggap sebagai tanda bahwa tekanan fiskal akan muncul. Teknik kesenjangan fiskal, yang mengukur kebutuhan daerah berdasarkan potensi ekonomi daerah, biasanya digunakan untuk menentukan kebutuhan DAU per daerah. Menurut penelitian ini, DAU secara signifikan dan positif mempengaruhi belanja daerah. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki dampak langsung terhadap tekanan fiskal (Krogstrup & Oman, 2019). Namun, *Fiscal stress* dapat dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), suatu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Fitchen, 2019). Biasanya, DAU digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah yang melebihi pendapatan asli daerah (PAD) untuk mencegah terjadinya tekanan keuangan. Analisis data studi menunjukkan bahwa DAU menyumbang sekitar 40% dari total pendapatan daerah dari tahun 2019 hingga 2021, yang menyoroti peran penting DAU dalam komposisi keuangan daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2019, total pendapatan daerah Kabupaten Agam adalah sebesar Rp. 2.750.630.839.061,- dengan Rp. 1.380.490.312.000,- atau 50% berasal dari DAU. Demikian pula dengan Pariaman yang menerima Rp 2.163.439.062.000 dalam bentuk DAU pada tahun 2019, namun turun menjadi Rp 1.917.780.234.000 pada tahun 2020. Variabilitas ini dapat menyebabkan terjadinya *Fiscal Stress* jika DAU yang diterima rendah, meningkatkan risiko tekanan fiskal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap *Fiscal Stress* Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan ini didukung oleh nilai t-hitung yang negatif melebihi nilai kritis t-tabel ($-2,739 > 2,005$) dan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis kedua teruji kebenarannya yang mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap *Fiscal Stress* Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan teori keagenan, dampak ini bergantung pada faktor-faktor seperti keselarasan insentif, pengawasan yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas dalam kerangka kerja pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori keagenan, pemerintah dapat merancang kebijakan dan mekanisme untuk mengurangi tekanan fiskal dan memastikan penggunaan dana alokasi khusus yang bertanggung jawab oleh lembaga dan departemen (Rahayu & Junaidi, 2020).

Tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja kegiatan khusus menjadi berkurang dengan adanya DAK. Menurut lembaga penelitian (Wijana & SE, 2021),

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja modal. Penelitian sebelumnya telah menyelidiki hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tingkat *Fiscal Stress* di suatu daerah (Wujarso et al., 2023). Dalam konteks ini, *Fiscal Stress* merujuk pada tekanan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran serta kebutuhan mendesak untuk membiayai program-program dan layanan publik. Ditemukan bahwa DAK dapat berpengaruh terhadap tingkat *Fiscal Stress* di suatu daerah (Bessell & Bexley, 2021). Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Armawaddin et al., 2017) yang menemukan bahwa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi adalah signifikan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress* Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nilai signifikansi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata antara Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan hasil uji hipotesis. $1,932 < 2,005$ atau $0,059 > 0,05$ yang didukung oleh $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Analisis ini menunjukkan bahwa belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap *fiscal stress*. maka teori ketiga yang diajukan diterima.

Fiscal stress dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal (Fristanto, 2015). Suatu daerah dapat mengalami *Fiscal stress* dan menjadi tergantung pada transfer dari pemerintah pusat jika daerah tersebut meningkatkan belanja tanpa meningkatkan PAD (Martini et al., 2020). Meskipun demikian, dinyatakan dalam (Muda, 2012) dan (Septira et al., 2019) bahwa peningkatan belanja modal memiliki dampak yang kecil terhadap tekanan fiskal.

Temuan investigasi ini tidak sesuai dengan temuan (Iciah & Fadillah, 2021) studi ini menegaskan bahwa belanja modal mempengaruhi tekanan fiskal. Studi ini mendukung temuan studi lain (Azzahra et al., 2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak terlalu berpengaruh terhadap tekanan fiskal. Alasan utama dari pergeseran pembiayaan ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan layanan publik, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah yang dialokasikan atau perubahan arah belanja langsung untuk layanan publik, khususnya pembangunan infrastruktur (Widyasari et al., 2023). Anggaran daerah biasanya meningkat secara dramatis sebagai hasil dari investasi pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur. Namun, jika hal ini tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan, hal ini dapat menyebabkan tekanan fiskal yang parah, yang merupakan cerminan dari ketidakseimbangan anggaran antara pendapatan dan pengeluaran (Savitri, 2021). Seiring berjalannya waktu, peningkatan standar infrastruktur suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian *Fiscal Stress* dapat dipengaruhi oleh peningkatan belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress* Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Fiscal stress yang diakibatkan oleh pendapatan daerah yang tidak mencukupi, dapat secara signifikan mempengaruhi penyediaan layanan publik. Dorongan untuk meningkatkan otonomi daerah menimbulkan beban keuangan tambahan, yang membutuhkan ketergantungan yang lebih besar pada sumber-sumber pendapatan internal untuk menutupi berbagai pengeluaran. Keberhasilan transisi menuju otonomi sangat bergantung pada kesiapan daerah dan ketersediaan sumber daya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara belanja modal, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap tekanan fiskal di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Melalui pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa belanja modal,

dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fiscal stress di daerah. Kesimpulan ini didukung oleh hasil uji F sebesar $0,038 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap fiscal stress di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbarurizqillah A.A. dan Suwardi B.H. (2017) mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal, dengan fokus khusus pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Temuan mereka menunjukkan bahwa komponen belanja modal, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) secara bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap tekanan fiskal.

Arnett (2018) mengidentifikasi lima indikator utama untuk menilai tekanan fiskal di tingkat daerah: defisit anggaran, peningkatan pajak relatif terhadap tren pengeluaran, saldo anggaran akhir tahun yang tidak memadai, kinerja pendapatan pemerintah daerah yang memburuk, dan rasio keuangan. Namun, penelitian sebelumnya oleh Gowon dkk. (2021) mengindikasikan bahwa penggunaan gabungan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) tidak mempengaruhi tekanan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU yang dianggarkan lebih tinggi tidak berdampak pada tekanan fiskal. Akibatnya, variabel lain dapat menjelaskan efek dari tekanan keuangan. Perlu dicatat bahwa analisis ini tidak memasukkan variabel dana bagi hasil (DBH) dan hanya berfokus pada variabel PAD dan DAU.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Fiscal Stress Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Fiscal Stress Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Fiscal Stress dipengaruhi secara signifikan oleh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum.

Keterbatasan

Studi tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan bahwa penelitian ini mungkin terbatas oleh ketersediaan data yang akurat dan lengkap tentang DAU, DAK, Belanja Modal, dan Fiscal Stress. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mengurangi validitas hasil penelitian. Studi ini mungkin tidak mempertimbangkan semua faktor yang dapat memengaruhi Fiscal Stress di pemerintah daerah. Ada faktor-faktor lain seperti pendapatan asli daerah, tingkat inflasi, utang daerah, dan lain-lain yang juga dapat berkontribusi terhadap Fiscal Stress. Ada kemungkinan adanya masalah endogenitas dalam hubungan antara variabel yang dipelajari. Misalnya, ada kemungkinan bahwa Fiscal Stress mempengaruhi alokasi DAU, DAK, dan Belanja Modal, bukan sebaliknya.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi berikut ini dapat diusulkan untuk diimplementasikan bahwa pemerintah disarankan untuk melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi dampak belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kebijakan alokasi

dana publik lainnya terhadap tekanan fiskal. Penilaian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas dan efisiensi alokasi dana. Pertimbangan di masa depan mempertimbangkan untuk memasukkan variabel-variabel tambahan sebagai faktor independen, karena ada kemungkinan variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini dapat mempengaruhi *fiscal stress*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Asmara. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. 23–26.
- Abdullah, S., & Nazry. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. 6(2), 272–283.
- Abdullah, S., & Rona, R. (2014a). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Journal of Iqtishadia*, 7(1), 179–202.
- Anessi-Pessina, E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2012). Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: Siamese twins? *Public Administration Review*, 72(6), 875–884. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02590.x>. Budgeting
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 5.
- Azzahra, M., Arifin, K. Z., & ... (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Desentralisasi Fiskal terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera. *JEMSI (Jurnal Ekonomi* <http://www.journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/article/view/1595> Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Bessell, S., & Bexley, A. (2021). 11 Deepening multidimensional poverty: The impacts of COVID-19 on vulnerable social groups. ... of Economics, Crawford School of Public https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8xo0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA190&dq=dana+alokasi+khusus+terhadap+fiscal+stress&ots=B-gDMJHUqp&sig=v95OhDLCUGg6vEPOHj_LybLquHU
- Damanik, D., Panjaitan, P. D., & Siallagan, S. S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera *Jurnal KAFEBIS*. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/kafebis/article/view/1974>
- Fauzi, Teuku *et al.*, (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Di Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, Hal. 76-92
- Fitchen, J. M. (2019). *Endangered spaces, enduring places: Change, identity, and survival in rural America*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WXekDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=general+allocation+funds+against+fiscal+stress&ots=WS7uHpeiAm&sig=dVJw3MedI8CxKzoLHkFyW-Y6Hhk>
- Halim, A. dan A. S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. 2, 53–64. Ichsan, K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Fiscal Stress Terhadap

- Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung).
- Icih, I., & Fadillah, R. (2021). The Influence Of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth Of Gdp, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization And Diversification Of Regional Income On Fiscal Stress. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 3(02)
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (4 (ed.)). Universitas Diponegoro
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-meckling-76.pdf>
- Junita, A., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh *Fiscal Stress* Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten / Kota. *XX(03)*, 477– 478
- Keefer, P., & Khemani, S. (2003). The political economy of public expenditures. Background Paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Lu, H dan R. L. Facer. (2004). Budget Change in Georgia Counties: Examining Patterns and Practise. *American Review of Public Administration*, 34(1), 67-93.
- Purwanto, A. (2016b). Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 87–96
- Khairunnisa, A. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Fiscal Stress Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening ...*. repository.unsil.ac.id. <http://repository.unsil.ac.id/id/eprint/8504>
- Krogstrup, S., & Oman, W. (2019). *Macroeconomic and financial policies for climate change mitigation: A review of the literature*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YD-zDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=general+allocation+funds+against+fiscal+stress&ots=s1gmXHeLS2&sig=vRslb-s0s5ZJnHlArEBQH3kZRXs>
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2019). Bagaimana Pemerintah daerah merespon *Fiscal Stress?* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa ...* <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/840>
- Prasad, M. A., Elekdag, S., Jeasakul, M. P., Lafarguette, R., & ... (2019). *Growth at risk: Concept and application in IMF country surveillance*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JqQZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=general+allocation+funds+against+fiscal+stress&ots=sCUifdukh0&sig=bthTeGwwNK5ctFhH3-vMLhc9tDk>
- Rahmi, S., Novianti, N., Rifa, D., & ... (2019). Analysis Of Local Self-Sufficiency And Factors Influence The Regional Independence An Empirical Review in Municipal and Regency in *Jurnal Menara Ekonomi ...* <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaraekonomi/article/view/1666>
- Rianti, M. (2020). ... *Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress (Tekanan Anggaran) Pada Pemerintah ...* eprints.polsri.ac.id. <http://eprints.polsri.ac.id/9289/>
- Rivenbark, W. C., & Roenigk, D. J. (2011). Implementation of financial condition analysis in local government. *Public Administration Quarterly*, Vol. 35(2), 241-267. Savitri, A. D. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel ...* repository.stei.ac.id. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/4112>

- Syifa, A., Suhendar, D., & Purnama, D. (2021). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Stress* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa *Jurnal Riset Keuangan Dan ...* <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/4965>
- Widyasari, K., Dirgantari, N., Wahyuni, S., & ... (2023). Faktor Faktor Determinant Pertumbuhan Ekonomi Regional Pada Masa Pandemi Di Jawa Tengah. *Owner: Riset Dan ...* <https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1322>
- Wujarso, R., Sianipar, A. Z., Andhitiyara, R., & ... (2023). *Improving Local Government Performance Through Tax Optimization*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4MbKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=dana+alokasi+khusus+terhadap+fiscal+stress&ots=TOf3rQexl9&sig=mKUBouF9oY_3LYAp27hsbwHxU5Y